

**SKRIPSI**  
**RENDAHNYA MINAT KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM**  
**PEMILIHAN LEGISLATIF DI KECAMATAN SINJAI SELATAN**  
**TAHUN 2019**

**Disusun dan Diajukan oleh**  
**NURUL FITRI MUTMAINNA. HS**  
**E 111 16 003**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**RENDAHNYA MINAT KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN  
LEGISLATIF DI KECAMATAN SINJAI SELATAN TAHUN 2019**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

**Nurul Fitri Mutmainna. HS**  
**E111 16 003**

Telah Di Pertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 08 Maret 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si**  
**Nip. 197109171997031001**

  
**Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si**  
**Nip. 197107051998032002**

Mengetahui,

**Ketua Departemen  
Ilmu Politik**

  
  
**Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D**  
**Nip. 196212311990031023**

**HALAMAN PENERIMAAN**  
**SKRIPSI**  
**RENDAHNYA MINAT KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN**  
**LEGISLATIF DI KECAMATAN SINJAI SELATAN TAHUN 2019**

Disusun dan di ajukan oleh:

**Nurul Fitri Mutmainna Hs**

**E111 16 003**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitian ujian skripsi

Pada program studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada Sabtu, 22 Mei 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Drs. H. A.Yakub, M.Si.,Ph.D	(.....)
Anggota	: Dr. Gustiana, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing 1	: Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing 2	: Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si	(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Nurul Fitri Mutmainna. HS  
NIM : E11116003  
Program Studi : Ilmu Politik  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Rendahnya Minat Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019”. Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Maret 2021

Yang menyatakan



Nurul Fitri Mutmainna. HS

## ABSTRAK

Nurul Fitri Mutmainna. HS, “Rendahnya Minat Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing I dan Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perempuan dalam menyikapi kontestasi politik pada pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan dan faktor yang mendasari rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan tahun 2019. Dengan rumusan masalah pertama bagaimana perempuan menyikapi kontestasi politik di Kecamatan Sinjai Selatan, kedua faktor apa yang mendasari rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan tahun 2019.

Pada era demokrasi usaha untuk memunculkan gerakan feminisme semakin kuat, karena perempuan menuntut hak-hak dan keadilan. Gerakan feminisme tidak terlepas dari semangat perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan PUG dan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Namun kenyataan masih sulit merekrut perempuan. Teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu teori psikologi politik. Tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam. Lokasi penelitian di Kabupaten Sinjai, khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan 2019, yaitu: perempuan menyikapi kontestasi politik, hanya memberikan hak suara, budaya, dan kelalaian partai politik. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat keterlibatan perempuan yang sulit direkrut ditinjau pola pikir perempuan dari sifat, kurang tertarik terhadap politik, tidak mengetahui adanya kuota 30%, perempuan yang baru berusaha mencari simpati masyarakat ketika akan diselenggarakan pemilihan legislatif dan perempuan yang sudah pernah mencalonkan tidak ingin ikut kembali karena adanya sanksi sosial di lingkungan setempat. Apabila ditinjau pola pikir dari motif yaitu terbatasnya motivasi perempuan untuk meningkatkan diri, serta terbatasnya wawasan tentang politik.

**Kata Kunci: Perempuan, Pengarusutamaan gender, Sifat dan Motif**

## **Abstract**

NurulFitriMutmainna. HS, “Low Interest for Women’s Involvement in the Legislative Elections in South Sinjai District in 2019”. Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si as An Advisor I and Dr. ArianaYunus, S.IP, M.Si as An Advisor II.

The aim of this study was to know women in approaching a political dispute on the legislative elections in South Sinjai district and the factors underlying the low interest in women’s involvement in the legislative elections in South Sinjai district in 2019. The first issue of how women view the political dispute in South Sinjai district. The second of what factors underlying the low interest in women’s involvement in the legislative elections in South Sinjai district in 2019.

In the democratic era, the attempt to produce the feminist movement is growing stronger as women demand for rights and justice. The feminist movement is not independent of the women spirit to achieve equality standing with men. Therefore, the government issued gender filing policies and a 30 % requirement of women’s inclusion in parliament. But the reality is still difficult to recruit women. The theory used in analyzing is that of political psychology. A type of descriptive research using qualitative research methods. The data collection is conducted in an in-depth interview. Research location in Sinjai especially in South Sinjai district in 2019.

The findings of this study shows still lack of interest in women’s involvement in the legislative elections in South Sinjai district in 2019 which is: women who approach political dispute only give voice, culture, and political party negligence. The factors that lead to low interest in women involvement are hard to acquire based on women mindset from attitude, lack of interest in politics, not knowing of the 30 % and the women who have already voted do not want to re-enlist because of local social sanctions. Based on the mind-set of motives which are limited to women’s self-improvement, as well as limited political insight.

**Key Words: Women, Gender Filing, Attitude and Motives**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rendahnya Minat Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019”. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak H. Sambang Daeng Ngalle dan Mama Hj. Kusmawati yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi serta doanya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan dilingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.

6. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam (Alm), M.Ag, Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Umami Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf jurusan ilmu politik khususnya Bapak Aditya, Bapak Hamzah, dan Ibu Hasna, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
9. Kepada seluruh narasumber/Informan atas kesediannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Program Studi Ilmu Politik yang menemani selama proses perkuliahan terkhusus kepada Caca, Widya,

Fedora, Apri, Alfa, Uni, Gusti, Eva, Cici, Yul, Indah, Ira, Wide, Wanda, Riswan, Anwar, Gazali, Naufal, Anggi, Diaz yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi.

11. Seluruh keluarga besar Himapol Fisip Unhas yang telah menjadi tempat berproses dan berorganisasi selama ini.
12. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Saifullah D, S.Kom, yang selalu menemani penulis mengurus segala sesuatu dari awal masuk UNHAS, proses penyusunan proposal, sampai dengan proses penyelesaian skripsi. Kepada Anwar Akbar Amdar S.Tr.Pi, Tiara, dan Ami yang selalu menemani dan menyemangati penulis terkhusus kepada Kakak Astmha, S.IP yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan selalu menyemangati penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Makassar, 08 Maret 2021

Nurul Fitri Mutmainna.Hs

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

2.1	Politik Gender .....	10
2.2	Teori Psikologi Politik .....	19
2.3	Kajian Pustaka.....	25
2.4	Kerangka Berfikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>31</b>
3.1	Tipe dan Dasar Penelitian .....	31
3.2	Lokasi Penelitian.....	32
3.3	Sumber Data Penelitian.....	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5	Penentuan Informan .....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Sinjai.....	42
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Sinjai Selatan .....	47
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>56</b>
5.1	Perempuan Di Kecamatan Sinjai Selatan Dalam Menyikapi Kontestasi Politik Pada pemilihan Legislatif Di kabupaten Sinjai Tahun 2019.....	59

5.2 Faktor-Faktor Yang Mendasari Rendahnya Minat Keterlibatan Perempuan Di Kecamatan Sinjai Selatan Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019 .....	68
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
6.1 Kesimpulan .....	87
6.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir

Gambar 1.2 Grafik Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Sinjai

Gambar 1.3 Peta Kecamatan Sinjai Selatan

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai  
2014-2019

Tabel 1.2 Data Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai  
2019-2024

Tabel 2.1 Informan Peneleitian

Tabel 3.1 Luas Daerah Dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Sinjai

Tabel 3.2 Luas Dan Jarak Dari Ibukota Kecamatan Dan Ibukota Kabupaten

Tabel 3.3 Data Demografi Kecamatan Sinjai Selatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Gerakan feminisme sudah ada di Indonesia sejak tahun 60-an. Pada era demokrasi yang erat kaitannya dengan membangun suatu pemerintahan dan birokrasi senantiasa mengarah pada tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang penting adalah kekuasaan terletak ditangan rakyat bukan ditangan penguasa atau birokrat. Sehingga akan melahirkan sistem kontrol yang memadai dari rakyat.<sup>1</sup>

Pada era demokrasi saat ini, usaha untuk memunculkan gerakan feminisme semakin kuat, bahkan banyaknya kaum perempuan yang menuntut hak, keadilan<sup>2</sup> dan kesetaraan khususnya dalam bidang politik. Agar dapat memberikan kesetaraan terhadap perpolitikan di Indonesia dengan melibatkan perempuan didalamnya. Gerakan feminisme merupakan sebuah gerakan yang tidak terlepas dari semangat perempuan untuk memiliki kesetaraan. Gerakan ini memberikan semangat untuk perempuan agar ikut andil dalam wilayah politik karena ketika laki-laki lebih dominan dalam

---

<sup>1</sup>Muslim Mufti, M.Si,Kekuatan Politik Di Indonesia, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013),hal.161

<sup>2</sup> Astmha,Skripsi,Modalitas Calon Legislatif Perempuan Di Kabupaten Wajo,2019,hal.1

pengambilan keputusan di parlemen maka kebijakan yang dikeluarkan dianggap kurang mengakomodasi kepentingan perempuan.

Kesetaraan yang dituntut oleh perempuan dalam segala bidang merupakan hal yang wajar, terutama kesetaraan dalam bidang politik. Agar perempuan dapat memperjuangkan hak dan kepentingan umum. Sehingga perempuan yang terlibat dalam kontestasi politik sebisa mungkin mendapat kursi di parlemen agar dapat menyuarakan aspirasi perempuan.

Berbagai cara yang dilakukan perempuan melalui gerakan feminisme untuk mencapai kesetaraan dan berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang kesetaraan perempuan akan tetapi masih kurang maksimal. Sehingga menanggapi hal tersebut Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender ini merupakan model untuk pemberdayaan kaum perempuan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk memberikan ruang bagi perempuan disegala bidang. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, diharapkan bisa lebih mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender<sup>3</sup>. Namun kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi laki-laki masih terus mendominasi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sinjai yaitu sulitnya memperoleh calon anggota legislatif

---

<sup>3</sup> Astmha, Skripsi, Modalitas Calon Legislatif Perempuan Di Kabupaten Wajo,2019,hal.2

perempuan, sehingga dapat dilihat bahwa pada saat ini masih kurangnya keterlibatan perempuan utamanya dalam bidang politik.

Pentingnya keterlibatan perempuan untuk ikut dalam kontestasi politik agar bisa terpilih duduk diparlemen dan keberadaannya di parlemen sangat dibutuhkan untuk berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Perempuan yang memiliki kesadaran akan pentingnya perempuan berada diparlemen. Akan berusaha samaksimal mungkin untuk mendapatkan kursi karena dengan banyaknya perempuan yang duduk di parlemen merupakan suatu kondisi yang adil, dalam berbagai pengambilan keputusan karena dengan keterlibatan perempuan dibidang politik. Namun saat ini masih kurangnya kesadaran perempuan akan keterlibatannya didalam bidang politik, sehingga untuk merekrut perempuan agar terlibat dalam kontestasi politik masih mendapatkan kendala.

Fenomena yang terjadi di Dapil III (Kecamatan Sinjai Selatan-Sinjai Borong) kurangnya keterlibatan perempuan dalam mengikuti kontestasi politik, sehingga partai politik mengalami kendala dalam melakukan rekrutmen pada calon legislatif perempuan. Padahal sesuai dengan peraturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Partai Politik, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan<sup>4</sup>.

Sebagai tindak lanjut afirmasi action KPU mengeluarkan peraturan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 27 ayat (1) huruf b peraturan KPU menyatakan ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada pemilihan legislatif.<sup>5</sup> Hal ini menjamin bahwa partai politik peserta pemilu akan memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dengan pemberian kuota tersebut bisa meningkatkan keberadaan perempuan di parlemen.

Pemilihan legislatif tahun 2014 pengurus partai politik mengalami kendala dalam pemenuhan kuota perempuan, hal ini kembali terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2019 pengurus kewalahan dalam merekrut perempuan agar terlibat dalam kontestasi politik. Pada pemilihan tahun 2019 hampir seluruh pengurus partai lambat mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sinjai<sup>6</sup>. Dapat dilihat dengan adanya pernyataan dari sekretaris partai perindo menurut Slamet Riyadi

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, hal.3

<sup>5</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2013, Tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota, hal.28-29

<sup>6</sup> Parpol Di Sinjai Akui Sulit Penuhi Kuota Perempuan,  
(<http://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/07/20/>), diakses pada 20 September 2019

*“...Sinjai sedang kesulitan memperoleh caleg perempuan, sebagian besar perempuan di Sinjai tidak tertarik politik...”<sup>7</sup>*

Dari pernyataan tersebut kendala yang dialami pengurus partai yaitu sulitnya dalam merekrut calon legislatif perempuan. Adapun tabel data calon anggota legislatif dari pemilihan legislatif priode 2014-2019 dan pemilihan legislatif priode 2019-2024 dibawah ini :

**Tabel 1.1 Data Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Pemilihan Priode 2014-2019**

Daerah pemilihan	Laki-Laki	Perempuan
Dapil 1	72	36
Dapil 2	60	34
Dapil 3	48	34
Dapil 4	44	23
<b>Total</b>	<b>224</b>	<b>127</b>

Sumber: Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) SINJAI

Data diatas menjelaskan tentang jumlah calon legislatif DPRD dari setiap daerah pemilihan (Dapil) priode 2014-2019 di Kabupaten Sinjai. Angka ini menunjak bahwa laki-laki masih mendominasi yaitu 64% dan perempuan 36%. Kuota 34% calon legislatif ini tidak menjamin bahwa tingkat

<sup>7</sup> Parpol Di Sinjai Akui Sulit Penuhi Kuota Perempuan,  
(<http://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/07/20/>), diakses pada 15 Oktober 2019

keterpilihannya akan sesuai yang diharapkan seimbang antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 1.2 Data Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sinjai Pemilihan Priode 2019-2024**

Daerah pemilihan	Laki-Laki	Perempuan
<b>Dapil 1</b>	79	42
<b>Dapil 2</b>	69	41
<b>Dapil 3</b>	53	40
<b>Dapil 4</b>	53	27
<b>Total</b>	254	150

Sumber: kantor Komisi Pemilihan Umum SINJAI

Data diatas menjelaskan tentang jumlah calon legislatif DPRD dari setiap daerah pemilihan (Dapil) priode 2019-2024 di Kabupaten Sinjai. Data ini menjelaskan adanya peningkatan jumlah calon anggota legislatif laki-laki ataupun perempuan pada pemilihan tahun 2019-2024 dikarenakan jumlah partai yang bertambah. Pada pemilihan priode 2014-2019 hanya 12 (duabelas) partai sedangkan pemilihan priode 2019-2024 bertambah menjadi 14 (empatbelas) partai. Pernyataan dari Hilal Yusuf sebagai ketua DPC partai Hanura Kabupaten Sinjai

“...Partai politik tidak mempersulit bagi perempuan yang akan mendaftarkan diri bahkan proses administrasi dilakukan oleh pengurus partai

dan pembiayaan administrasi ditanggung partai. Karena memang sebagian besar pengurus partai politik mengeluh dalam pemenuhan kuota 30%...”<sup>8</sup>

Pernyataan diatas bahwa keseluruhan Kabupaten Sinjai sulit dalam merekrut/mencari figur perempuan untuk mencalonkan dalam pemilihan legislatif akan tetapi dapil III Kecamatan Sinjai Selatan-Sinjai Borong merupakan salah satu daerah paling sulit untuk mencari calon legislatif perempuan utamanya di Kecamatan Sinjai Selatan bahkan ada 1 partai politik yang tidak mendapatkan calon legislatif perempuan di Kecamatan Sinjai Selatan.

Melihat fenomena sulitnya partai politik untuk mencari perempuan yang ingin mencalonkan sehingga dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Sinjai Selatan merupakan kecamatan yang rendahnya minat keterlibatan perempuan untuk ikut mencalonkan dalam kontestasi politik pemilihan legislatif. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Sinjai Selatan dengan dasar adanya fenomena yang terjadi. Padahal Kecamatan Sinjai Selatan letaknya dekat dari kota yang dapat dikatakan daerah berkembang yang pemikirannya diharapkan bisa lebih terbuka, tetapi masih terkendala terhadap perempuan yang kurang terlibat atau tertarik dalam mengikuti kontestasi politik. Melihat Fenomena mengenai sulitnya merekrut calon legislatif perempuan tahun 2019. Penelitian ini akan berfokus

---

<sup>8</sup> Hilal Yusuf. Ketua DPC Partai Hanura. Hasil Observasi. Sinjai 21 Oktober 2019.

pada **“Rendahnya Minat Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019“**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana perempuan menyikapi kontestasi politik di Kecamatan Sinjai Selatan ?
2. Faktor apa yang mendasari rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019 ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui perempuan dalam menyikapi kontestasi politik pada pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendasari rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dengan adanya kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini secara akademis yaitu memberikan pemahaman dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam bidang ilmu politik serta sebagai tambahan wawasan kajian ilmiah untuk mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu politik. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mahasiswa sebagai agen perubahan, mampu memahami terkait perempuan didalam menyikapi kontestasi politik dan faktor yang mendasari rendahnya minat ketelibatan perempuan sehingga mengakibatkan sulitnya dalam merekrut perempuan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini secara kegunaan praktis yaitu, bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini tentang perempuan dalam kontestasi politik, masyarakat dapat melihat pentingnya keterlibatan perempuan dalam mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Sehingga dapat memanfaatkan ruang yang telah diberikan untuk perempuan. Sedangkan manfaat bagi peneliti yaitu dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penelitian dalam membaca serta dapat menganalisis tentang perempuan dalam kontestasi politik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Politik Gender

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, yang berkaitan dengan negara dan pemerintah. Politik tidak terlepas dari masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).<sup>9</sup> Menurut Peter Merkl politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*).<sup>10</sup> Sehingga ketika membahas mengenai politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, secara umum politik berkaitan langsung dengan kepemimpinan suatu wilayah ataupun negara.

Politik di Indonesia termasuk urusan-urusan kenegaraan, sudah ada sejak dulu yang sering diartikan dengan kekuasaan. Politik yang berkembang diseluruh lapisan masyarakat yang mengidentikkan bahwa politik merupakan urusan laki-laki. Hal ini dapat diidentifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku antara laki-laki dan perempuan yang berkembang didalam

---

<sup>9</sup> Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, ( Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008),hal.14

<sup>10</sup> Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, ( Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008),hal.15

masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.<sup>11</sup> Oleh karena itu gender merupakan sesuatu yang dapat diubah tergantung suku atau bangsa, budaya, status sosial, maupun pemahaman agama, karena gender merupakan sesuatu yang dibuat atau dibentuk oleh masyarakat, sebagai pembeda. Setiap pembeda selalu memunculkan ketidakadilan baik pembeda dalam kasta, warna kulit, etnis, agama, dan, tidak terkecuali dengan gender<sup>12</sup>.

Gender adalah suatu konsep yang membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secara imbang, dimana selama ini terkesan selalu berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan, karena dianggap bahwa kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender, sehingga apabila berbicara tentang gender banyak orang yang menghubungkan dengan laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

Paradigma ini sudah tertanam didalam masyarakat adanya istilah maskulinitas dan feminitas. Hal ini dikaitkan dengan segala bidang kehidupan baik mengenai peran, hak, kewajiban, ataupun kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlibatan perempuan dalam

---

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta:Paramadina, 2001, hal.35

<sup>12</sup> Titin Murtakhamah, Jurnal ,Pentingnya Pengarusutamakan Gender Dalam Program Pengurangan Resiko Bencana. Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.1, Juni 2013), hal.38

<sup>13</sup> Ukhti Raqim, Skripsi, Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga, 2016. hal. 14

kancah politik masih sangat kurang. Keterlibatan perempuan yang masih kurang dalam mengikuti kontestasi politik pada pemilihan legislatif dapat dikaitkan dengan adanya paradigma dimasyarakat yang menganggap perempuan merupakan warga negara kelas dua. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya budaya patriarki yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang perempuan dan politik tidak lepas dari image yang ada di masyarakat, menganggap bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena dianggap bahwa perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Banyaknya anggapan bahwa dunia politik itu keras, secara tidak langsung mengasumsikan hanya laki-laki yang layak untuk berada didalam dunia politik. Adanya asumsi seperti ini mengakibatkan perempuan tidak dapat mengembangkan potensi ataupun kemampuan yang dimilikinya, padahal tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan<sup>14</sup> . Maka dari itu berbagai peraturan maupun kebijakan dikeluarkan pemerintah baik adanya peraturan mengenai kuota 30% untuk perempuan dalam legislatif, yang diharapkan dapat menjamin perempuan diikuti sertakan dalam legislatif, maupun adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang

---

<sup>14</sup> Wewen Kusumi Rahayu, Jurnal, Analisis Pengarusutamakan Gender Dalam Kebijakan Publik, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol 2, Nomor 1, Juni 2016, ([journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/1524/850](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/1524/850)), hal.94

Pengarusutamaan Gender yang merupakan suatu upaya pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan.

### **2.1.1. Peraturan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Kontestasi Politik**

Peraturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan<sup>15</sup>. Sebagai tindak lanjut afirmasi action KPU mengeluarkan peraturan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 27 ayat (1) huruf b peraturan KPU menyatakan ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada pemilihan bersangkutan.<sup>16</sup> Adanya kuota 30% yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dari total calon legislatif baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini merupakan buah gagasan dari penyetaraan gender dalam bidang politik, keterwakilan perempuan merupakan sistem kuota khusus untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Dengan adanya keseimbangan laki-laki dan

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, hal.3

<sup>16</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2013, Tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota, hal.28-29

perempuan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan dapat melahirkan suatu kebijakan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dan ini menjamin bahwa partai politik peserta pemilu akan memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan.

Peraturan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan *Affirmative Action* (kebijakan afirmatif) yakni tindakan untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan, dengan adanya kesetaraan gender merupakan upaya mewujudkan demokratisasi sehingga seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi. Hal ini diharapkan menjadi solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik karena dengan adanya kuota 30% merupakan peluang bagi perempuan dan sebagai wadah untuk keterlibatan perempuan dalam bidang politik.<sup>17</sup>

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan dalam ruang politik untuk menuju suatu keadilan dan kesetaraan gender. Ketentuan mengenai kuota 30% dengan wajib melibatkan perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan wujud nyata persamaan golongan sehingga hak-hak perempuan tidak lagi

---

<sup>17</sup> Hasriani Hamid, Jurnal, Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya *Affirmative Action*, Vol 3 Nomor 1 Desember 2019, hal.26

dikesampingkan. Keterwakilan perempuan ini masih membutuhkan perhatian oleh kaum perempuan sehingga dapat terlaksana dengan baik karena dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dapat berdampak pada keadilan politik. Maka dari itu pentingnya kesadaran perempuan terhadap perannya dalam politik, karena pada prakteknya tidaklah dengan mudah dapat terealisasikan seperti dalam kontestasi politik pada pemilihan legislatif 2019. Padahal dengan adanya peraturan mengenai kuota 30% diharapkan perempuan dapat terlibat aktif dalam kontestasi politik.

Kontestasi adalah pertarungan berbagai macam kelompok, masing-masing memperjuangkan ideologi, nilai, solusi dan sebagainya. Wacana atau diskusi akan selalu dibuka bermunculan pula berbagai perbandingan yang mengundang debat, maupun konflik. Kontestasi politik dalam pemilihan legislatif merupakan salah satu pesta demokrasi yang mendorong para calon kandidat melakukan berbagai upaya untuk menarik simpati masyarakat, sehingga masyarakat tertarik memberikan dukungan untuk memenangkan pemilihan tersebut.

### **2.1.2 Kebijakan Pengarusutamaan Gender**

Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam politik. Menurut Rot Hague et al politik adalah kegiatan yang menyangkut cara

bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.<sup>18</sup> Maka dari itu pentingnya keterlibatan politik semua warganegara baik laki-laki maupun perempuan terutama dalam pemilihan legislatif.

Isu mengenai gender telah menjadi masalah utama dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan karena salah satu tujuan pembangunan adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Upaya dilakukan untuk menghapuskan ketidakadilan gender dengan melaksanakan suatu strategi, sehingga pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesetaraan gender. Adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) yang didalamnya mengembangkan dan melaksanakan :

1. Program/kegiatan yang spesifik diperuntukkan bagi laki-laki atau perempuan

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta 2008), hal.16-17

2. Program/kegiatan yang strategi gender untuk memberdayakan laki-laki dan perempuan dalam rangka menghilangkan subordinasi, diskriminasi sehingga mereka dapat setara dalam pembangunan
3. Program/kegiatan untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dalam melaksanakan pengarusutamaan gender<sup>19</sup>

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang yaitu salah satunya dalam bidang politik, sehingga keluarnya kebijakan mengenai pengarusutamaan gender (PUG) dengan tujuan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses dan keterlibatan serta memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan, dengan adanya pengarusutamaan gender (PUG) diharapkan dapat mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan gender apalagi pengarusutamaan gender (PUG) itu sendiri dilaksanakan dalam otonomi daerah baik dalam pembangunan provinsi, kabupaten dan kota yang dituntut sehingga dapat memanfaatkan peluang yang telah diberikan yang diharapkan mampu memberikan pemberdayaan bagi perempuan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan.<sup>20</sup>

Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutmaan Gender, merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pemerintah telah memberikan ruang yang besar kepada

---

<sup>19</sup> Annisa Valentina, Jurnal, Perempuan Agama dan Gender, Vol. 17, No. 2, 2018, hal. 196

<sup>20</sup> Wewen Kusumi Rahayu, Jurnal, Analisis dan Pelayanan Publik, Vol 2, No. 1, juni 2016, hal. 99

perempuan yaitu kebijakan terkait peluang perempuan untuk berkiprah disegala bidang dalam negara ini juga diruang politik dan birokrasi.<sup>21</sup> Pengarusutamaan gender ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan didalamnya berdasarkan dari potensi/kemampuan dan bidang yang dimiliki oleh perempuan, dengan diberikannya ruang perempuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki, dapat dilihat pemerintah kini telah berupaya dalam mewujudkan kesetaraan atau keadilan gender, agar perempuan dapat eksis dalam segala bidang termasuk dalam bidang politik, karena bagian penting dengan adanya pengarusutamaan gender yaitu penting perempuan diposisikan setara dengan laki-laki termasuk dalam bidang politik.<sup>22</sup>

Keterlibatan perempuan di parlemen akan memberikan warna baru dalam perpolitikan di Indonesia sehingga akan memberikan ide ataupun gagasan yang dapat merepresentasikan kepentingan konsituen. Namun persoalan belum selesai dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena banyaknya perempuan yang tidak memanfaatkan peluang yang telah diberikan oleh pemerintah utamanya dalam bidang politik.

---

<sup>21</sup>Ariana,Sukri,Dian Ekawaty,Jurnal,Mencermati Aspek Pengarusutamaan Gender Dalam Penempatan pegawai pada posisi Struktural Dalam Birokrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan,Vol 6, No 2 Tahun 2018

<sup>22</sup>Ariana,Sukri,Dian Ekawaty,Jurnal,Mencermati Aspek Pengarusutamaan Gender Dalam Penempatan Pegawai Pada Posisi Struktural Dalam Birokrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan,Vol,6,No.2 Tahun 2018,hal.148

## 2.2. Teori Psikologi Politik

Salah satu aliran yang berpengaruh dalam psikologi yaitu aliran Behaviorisme. Aliran ini didirikan pada tahun 1913 di Amerika Serikat oleh J.B. Watson (1878-1958).<sup>23</sup> Psikologi dari bahasa Yunani kuno yaitu (*psyche* = jiwa dan *Logos* = kata). Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/mental, akan tetapi tidak secara langsung karena psikologi itu bersifat abstrak. Psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.<sup>24</sup>

Psikologi politik merupakan suatu disiplin tersendiri ditetapkan pada 1977 dengan didirikannya *International Society for political psychology* (ISPP) dan diterbitkan jurnal ilmiah dengan judul *political psychology* pada 1977.<sup>25</sup> Munculnya psikologi politik, untuk penguatan suatu teori psikologi dalam menjelaskan mengenai perilaku politik, seperti keputusan dan tindakan politik yang diambil oleh orang-orang.<sup>26</sup> Psikologi merupakan kerja akademik yang bertujuan mempelajari kehidupan mental pada umumnya, yaitu termasuk

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), hal. 13

<sup>24</sup> Nanik Sulistiawati, *Konsep Dasar Psikologi Dan Teori*, 2015, ([https://www.academia.edu/18833591/konsep\\_dasar\\_psikologi\\_dan\\_teorinya](https://www.academia.edu/18833591/konsep_dasar_psikologi_dan_teorinya)), hal. 6, diakses pada 12 November 2019

<sup>25</sup> Prof. Dr. Hamdi Muluk, *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. xv

<sup>26</sup> Almo Ardian Pengantar Psikologi Politik, ([https://www.academia.edu/11533788/pengantar\\_psikologi\\_politik](https://www.academia.edu/11533788/pengantar_psikologi_politik)) diakses pada 14 November 2019

dalam studi-studi pustaka dan ilmu sosial. Untuk itu kajian akademik psikologi politik dapat dianalisa dalam mengkaji perilaku politik seperti pemberian suara, termasuk kurangnya keterlibatan perempuan mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan legislatif. Dengan mengadaptasi konsep-konsep psikologi agar relevan dengan politik.<sup>27</sup> Dapat dilihat dalam konsep psikologi bahwa sifat kepribadian mempengaruhi perilaku.

Kepribadian adalah suatu dasar pokok ilmu psikologi yang mampu mempengaruhi perilaku dan tindakan politik. Teori ini dapat diaplikasikan dalam analisis tentang suatu masalah atau isu politik. Untuk itu dengan adanya psikologi politik dapat mengetahui, kepribadian seseorang dalam bertingkah laku dan cara kepribadian mempengaruhi perilaku politik.

Perkembangan ilmu dan teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pola pikir masyarakat semakin maju. Adapun budaya patriarki yang ada dalam masyarakat semakin berkurang bahkan di era saat ini masyarakat yang telah mampu berpikir maju juga telah berupaya merubah kondisi yang menyebabkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat antara laki-laki dan perempuan sehingga saat ini telah banyak masyarakat yang tidak hanya memandang dari satu sudut pandang akan tetapi pola pikir masyarakat telah terbuka dengan membuka ruang terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Perempuan yang menyadari perannya dalam dunia politik memanfaatkan peluang yang telah diberikan, akan tetapi masih

---

<sup>27</sup> Prof.Dr.Hamdi Muluk,Pengantar Psikologi Politik,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2012),hal.7

banyak perempuan yang dapat dikatakan mampu tetapi kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam berpolitik masih rendah. Maka dari itu untuk menganalisis pola pikir perempuan sehingga berdampak pada keterlibatannya dalam kontestasi politik pada pemilihan legislatif 2019, maka akan digunakan teori psikologi politik yaitu teori sifat dan teori motif :

#### **a. Teori sifat**

Teori sifat dalam psikologi dimulai dari hasil kerja Gordon Allport (1937,1961,1968). Gordon Allport menganggap bahwa sifat-sifat kepribadian merupakan hal-hal pokok yang menentukan bagaimana cara orang-orang merespon lingkungannya dan membedakan antara sifat utama (*cardinal traits*), sifat tengah (*central traits*) , dan sifat sekunder (*secondary traits*).<sup>28</sup>Gordon Allport membedakan 3 sifat kepribadian yaitu :

##### 1. Sifat Utama (*cardinal traits*)

Sifat utama ini merupakan sifat yang paling mendominasi dalam hidup seseorang dan kerap kali seseorang dapat dikenali secara spesifik melalui sifat-sifat dominan yang dimiliki.

##### 2. Sifat Tengah (*central traits*)

Sifat tengah adalah karakteristik umum yang membentuk dasar-dasar kepribadian seseorang. Sifat tengah tidak terlalu mendominasi keseluruhan hidup seseorang seperti halnya sifat utama. Perbedaan

---

<sup>28</sup> Prof.Dr.Hamdi Muluk,Pengantar Psikologi Politik,(Jakarta:PT RajaGrafinfo Persada,2012),hal.31-32

tersebut menggambarkan bahwa individu akan menunjukkan tingkatan yang berbeda, yang pada akhirnya akan menunjukkan keunikan mereka untuk dapat dikenali dalam lingkungan sosial.<sup>29</sup> Namun, Sifat tengah merupakan karakteristik utama yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan orang lain.

### 3. Sifat Sekunder (*secondary traits*)

Sifat sekunder yaitu sifat yang paling tidak teratur dalam mempengaruhi perilaku. Sifat-sifat yang terkadang berkaitan dengan sikap atau preferensi seseorang. Sifat-sifat ini kerap kali muncul hanya dalam situasi tertentu atau keadaan tertentu.

Seiring dengan perkembangan psikologi Olson dan Evams (1999) telah menyelidiki hubungan antara dimensi-dimensi atau sifat-sifat kepribadian lima besar dengan perbandingan sosial. Penulis tersebut menggunakan sebuah teknik baru (*Rochester Social Comparison Record*, catatan perbandingan Sosial Rochester), yang didalamnya subjek-subjek eksperimen memelihara sebuah catatan harian yang mencatat perbandingan sosial mereka untuk memastikan dengan siapa mereka membandingkan diri mereka, menyelidiki bagaimana perasaan orang-orang mengenai perbandingan tersebut. Mereka menemukan bahwa orang-orang

---

<sup>29</sup> Istiqomah. Jurnal. Manusia Dan Politik (Studi Perilaku Politik dalam Perspektif Psikologi), diakses pada tanggal 28 Januari 2021

yang memiliki skor *neuroticism* tinggi merasa lebih positif ketika mereka membandingkan diri mereka “ke bawah”, yaitu dengan orang lain yang memiliki reputasi atau status kurang dari reputasi atau status yang mereka miliki.<sup>30</sup>

Maka dari itu sifat-sifat kepribadian adalah hal-hal pokok yang dapat menentukan cara seseorang dalam merespon lingkungannya. Dengan teori sifat yang diungkapkan Goldan Allport akan digunakan dalam menganalisis pola pikir perempuan yang masih rendah minat keterlibatannya didunia politik.

#### **b. Teori motif**

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.<sup>31</sup> Madsen (1961) telah melakukan peninjauan terhadap hasil-hasil kerja dari dua puluh teoritikus motif yang berbeda. Beberapa peneliti yang membahas tentang motif-motif individu.<sup>32</sup> Motif-motif individu memiliki pengaruh dalam kepribadian dan perilaku politik. Motif menjadi suatu alasan atau dorongan

---

<sup>30</sup> Prof. Dr.Hamdi Muluk,Pengantar Psikologi Politik,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,)1 Oktober 2012), hal.33

<sup>31</sup> M.Nur Ghufro dan Rini Risnawita S,Teori-Teori Psikologi,(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2012),Hal.83

<sup>32</sup> Prof.Dr.Hamdi Muluk,Pengantar Psikologi Politik,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,1 Oktober 2012),hal.35

yang dapat menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu dan semua tingkah laku manusia atau suatu individu pada hakikatnya mempunyai motif.<sup>33</sup>

Menurut McClelland (1985) & Winner (1973,1987) yaitu dalam konteks hubungan antarpribadi, orang-orang yang memiliki kebutuhan tinggi akan kekuasaan lebih menunjukkan perilaku mengontrol dan mendominasi para bawahan dari pada orang-orang yang memiliki kebutuhan rendah akan kekuasaan. Kekuasaan yang merupakan kebutuhan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi individu/kelompok masyarakat, sehingga motif akan dijadikan bahan untuk menganalisis rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kuota 30% untuk menunjang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kuota yang telah diberikan untuk perempuan merupakan peluang yang besar bagi perempuan untuk menduduki jabatan di parlemen karena seseorang yang mempunyai jabatan mendapatkan kedudukan yang layak dimasyarakat akan mudah memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya aspirasi perempuan. Partai politik yang kesulitan merekrut perempuan dalam kontestasi politik, dari segi perilaku perempuan yang ada, dapat dilihat dari motif-motif yang

---

<sup>33</sup> Kajian Teori,(digilib.uinsby.ac.id/360/Bab%202.pdf),diakses pada 31 Desember 2019

mempengaruhi yang menyebabkan rendahnya minat keterlibatan perempuan.

### **2.3. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari penelitian berulang, maka dari itu perlu di kemukakan penelitian-penelitian yang terdahulu terkait dengan tema, Analisis perempuan dalam kontestasi politik yaitu dalam pemilihan legislatif perempuan, baik dalam bentuk buku, jurnal dan skripsi.

Skripsi Riris Resita Simamora yang berjudul “Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)”. Skripsi ini membahas tentang keberadaan perempuan di DPRD Lampung Timur yang kuota 30% belum terpenuhi. Maka dari itu, tujuan penelitian dari skripsi ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang keterwakilan perempuan dalam politik dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan di DPRD Lampung Timur. Teori yang digunakan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan dengan menggunakan metode deskriptif.

Skripsi Evi Mulyasari Akmul, Ilmu Pemerintahan, Unhas 2014, yang berjudul “Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Kabupaten Wajo”. Tujuan diadakan penelitian dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui minat kaum perempuan dalam jabatan politik sebagai perumus

kebijakan dan pengambil keputusan dan hal yang menyebabkan rendahnya jumlah kaum perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

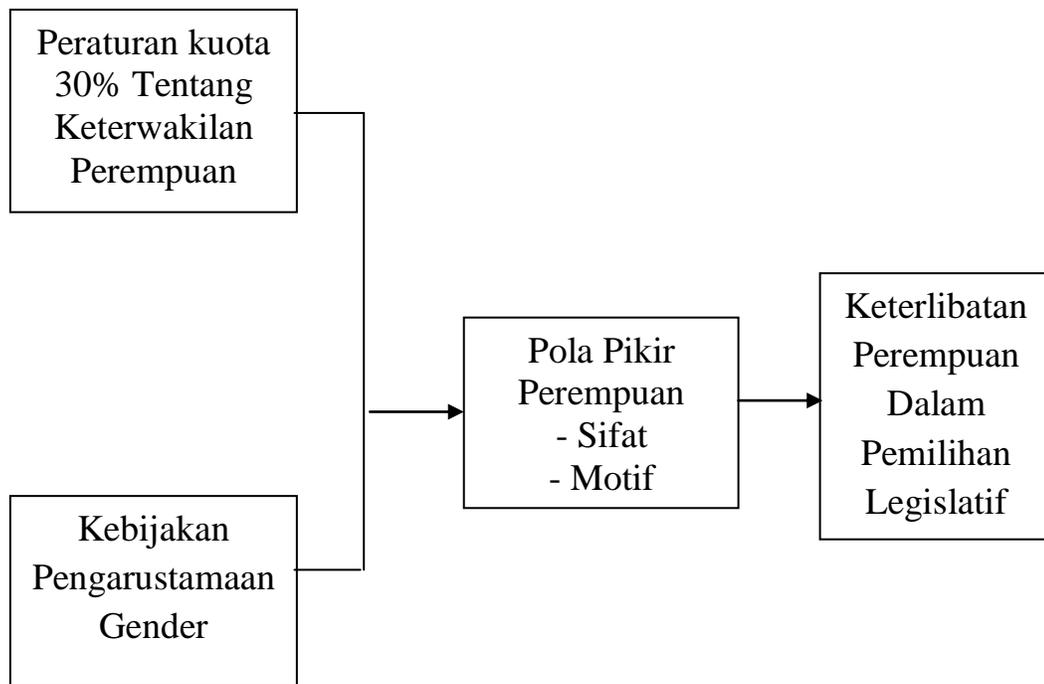
Skripsi Ririn Ramadani yang berjudul “Perempuan, Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)”. Skripsi ini membahas tentang perempuan parlemen, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar periode 2014-2019, pada setiap partai dan dapil, untuk mengetahui keterwakilan perempuan kota Makassar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemenuhan kuota di parlemen. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Persamaan dari ketiga skripsi diatas dapat dilihat bahwa Skripsi ini membahas tentang keberadaan perempuan di DPRD Lampung Timur yang kuota 30% belum terpenuhi. Skripsi yang kedua tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui minat kaum perempuan dalam jabatan politik sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan dan hal yang menyebabkan rendahnya jumlah kaum perempuan dalam jabatan politik. Selanjutnya skripsi yang ketiga yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar periode 2014-2019, pada setiap partai dan dapil, untuk mengetahui keterwakilan perempuan kota Makassar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemenuhan kuota di parlemen. Begitu pula

dengan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dapat dilihat dari teori psikologi politik yang digunakan untuk melihat pola pikir perempuan yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan yang rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan legislatif 2019 dan dianalisis menggunakan teori sifat dan teori motif.

#### 2.4. Kerangka Berfikir



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir**

Pada era demokrasi saat ini, usaha untuk memunculkan gerakan feminisme semakin kuat, bahkan banyaknya kaum perempuan yang menuntut hak, keadilan dan kesetaraan. Gerakan feminisme ini merupakan suatu hal yang wajar, yang perempuan menuntut adanya kesetaraan dalam berbagai bidang utamanya dalam bidang politik.

Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama maka dari itu adanya perturan kuota 30% keterwakilan perempuan dan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender ini merupakan model untuk pemberdayaan kaum perempuan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk memberikan ruang bagi perempuan disegala bidang. Pengarusutamaan gender merupakan kebijakan yang dikeluarkan presiden untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang terjadi di Kecamatan Sinjai Selatan perempuan kurang memanfaatkan peluang yang diberikan untuk duduk di parlemen.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang dimanfaatkan oleh perempuan itu sendiri karena pola pikir perempuan yang masih awam terhadap politik. Untuk pola pikir perempuan dapat dilihat dengan teori psikologi dengan mengadaptasi teori psikologi politik agar relevan dengan politik karena munculnya teori psikologi politik merupakan sebuah penguatan teori psikologi untuk melihat tindakan atau perilaku politik, maka dari itu untuk

mengkaji psikologi politik seperti pemberian suara, termasuk dalam rendahnya minat keterlibatan perempuan sehingga sulitnya dalam mencari calon legislatif perempuan untuk mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

Maka dari itu dengan adanya peraturan kuota 30% keterwakilan perempuan, dapat dilihat bahwa perempuan telah diberikan ruang sebesar-besarnya oleh partai politik untuk ikut terlibat dalam kontestasi politik. Apalagi peraturan tersebut sudah ditunjang dengan adanya kebijakan pengarusutamaan gender yang memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang khususnya dalam bidang politik sehingga dalam menganalisis tentang rendahnya minat keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2019, dapat dilihat melalui pola pikir perempuan dengan sifat dan motif sehingga mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif yang berada di Kecamatan Sinjai Selatan.

Teori sifat dalam psikologi dimulai dari hasil kerja Gordon Allport (1937,1961,1968). Gordon Allport menganggap bahwa sifat-sifat kepribadian merupakan hal-hal pokok yang menentukan bagaimana cara orang-orang merespon lingkungannya dan membedakan antara sifat utama (*cardinal*

*traits*), sifat tengah (*central traits*) , dan sifat sekunder (*secondary traits*).<sup>34</sup>

Dan Teori motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.<sup>35</sup> Maka dari itu digunakan sebagai salah satu bahan analisis untuk melihat pola pikir perempuan sehingga berdampak pada keterlibatannya dalam kontestasi politik pada pemilihan legislatif tahun 2019.

---

<sup>34</sup> Prof.Dr.Hamdi Muluk,Pengantar Psikologi Politik,(Jakarta:PT RajaGrafinfo Persada,2012),hal.31-32

<sup>35</sup> M.Nur Ghufon dan Rini Risnawita S,Teori-Teori Psikologi,(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2012),Hal.83